NKP4

by Bayu Anuwar Sidiqie

Submission date: 03-Aug-2023 01:48AM (UTC+0700)
Submission ID: 2098599007
File name: NKP4_BAS.docx (867.72K)
Word count: 9382
Character count: 58431

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH

NKP: 4

NASKAH KARYA PERSEORANGAN (NKP)

TOPIK

PERAN POLRI DALAM MENJAGA STABILITAS KAMTIBMAS TERHADAP KONFLIK IDEOLGI

JUDUL

OPTIMALISASI PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA GUNA MENCEGAH KONFLIK ANTARUMAT BERAGAMA DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS KAMTIBMAS

OLEH:

NAMA	**:**	**BAYU ANUWAR SIDIQIE**
NO. SERDIK	**:**	**202303002052**
POKJAR	**:**	**23**

PESERTA DIDIK SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH POLRI
DIKREG KE - 63 T.A. 2023

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini:

   Nama : Bayu Anuwar Sidiqie

   Pangkat/NRP : Kompol/86101781

   Nomor Serdik : 202303002052

   Sebagai peserta didik Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri Dikreg ke-63 Tahun Anggaran 2023 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

   a. Naskah Karya Perseorangan (NKP) yang saya tulis adalah asli;

   b. Apabila ternyata sebagian atau seluruh tulisan NKP ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus Pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Lembang, 30 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,

Bayu Anuwar Sidiqie
No. Serdik 202303002052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang. 1
B. Rumusan Masalah. 2
1. Permasalahan. 2
2. Pokok-pokok persoalan. 3
C. Ruang Lingkup dan Sistematika. 3
1. Ruang Lingkup. 3
2. Sistematika. 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5
A. Hubungan Mata Pelajaran dengan Naskah. 5
B. Kajian Teori. 6
1. *Grand Theory.* 6
2. Middle Theory. 8
3. *Applied Theory.* 9
C. Pengumpulan, analisis data dan metode penelitian. 11
1. Mengumpulkan dan mengolah data. 11
2. Analisis data/fakta. 12
3. Metode penelitian. 12
D. Kerangka Berpikir. 12
BAB III PEMBAHASAN 13
A. Kondisi Faktual Menjaga Stabilitas Kamtibmas. 13
B. Kondisi Faktual Pencegahan Konflik Antarumat Beragama. 14
C. Kondisi Faktual Pendidikan Hak Asasi Manusia. 15
1. Persoalan. 16
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi. 18

BAB IV PEMECAHAN MASALAH 20
A. Analisis Strategi..... 20
1. Faktor Eksternal 20
2. Faktor Internal 22
3. Analisis Posisi Organisasi. 24
4. Faktor Strategi..... 25
B. Formulasi Strategi. 27
1. Visi 27
2. Misi..... 27
3. Tujuan 27
4. Kebijakan 28
5. Strategi..... 28
C. Implementasi Strategi 28
D. Evaluasi dan Pengendalian. 32
BAB V PENUTUP 35
A. Simpulan 35
B. Rekomendasi 36
DAFTAR PUSTAKA xxxvii
ALUR PIKIR..... xxxviii
POLA PIKIR..... xxxix
LAMPIRAN ES – OHA..... xl
LAMPIRAN ANALISIS SWOT xli
LAMPIRAN AHP xlii
LAMPIRAN MANAJEMEN RISIKO..... xlv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model hubungan Social Cognitive Theory 7
Gambar 4.1 Analisis Posisi Organisasi..... 25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hubungan *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory* . 11
Tabel 4.1 *External Factors Analysis Summary* (EFAS) 20
Tabel 4.2 *Analytical Hierarchy Process* (AHP) Faktor Eksternal 21
Tabel 4.3 *Internal Factors Analysis Summary* (IFAS) 23
Tabel 4.4 *Analytical Hierarchy Process* (AHP) Faktor Internal 23
Tabel 4.5 *Strategic Factors Analysis Summary* (SFAS) 26
Tabel 4.6 *Analytical Hierarchy Process* (AHP) Faktor Strategi 27

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH

TOPIK

PERAN POLRI DALAM MENJAGA STABILITAS KAMTIBMAS TERHADAP KONFLIK IDEOLGI

JUDUL

OPTIMALISASI PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA GUNA MENCEGAH KONFLIK ANTARUMAT BERAGAMA DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS KAMTIBMAS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan salah satu faktor kunci dalam menjamin pembangunan nasional maupun daerah juga pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, sering sekali stabilitas kamtibmas terganggu karena adanya konflik ideologi mulai dari perbedaan pandangan politik, status sosial dan ekonomi, juga perbedaan keyakinan antarumat beragama. Beberapa studi terkait hal tersebut menjelaskan bahwa ketidakstabilan politik, seperti konflik dan kekerasan, dapat menghambat investasi, merusak infrastruktur, serta menurunkan iklim bisnis, yang akhirnya berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi (Marfouk, dkk, 2017). Svaleryd, Helena & Vlachos, Jonas (2002) juga menyampaikan hal yang senada yaitu stabilitas kamtibmas berperan penting dalam membangun lingkungan yang aman dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi negara.

Konflik antarumat beragama dapat dimulai dari hal yang kecil seperti penyegelan rumah ibadah. Sebagaimana diketahui bahwa penyegelan rumah ibadah berpotensi menjadi konflik antarumat beragama yang lebih besar karena hal tersebut dirasakan sebagai pengekangan setiap individu yang memiliki perbedaan keyakinan.

Kondisi ini semakin diperparah karena seseorang cenderung mudah untuk digerakan dengan menggunakan isu agama. Beberapa contoh konflik antarumat beragama di Indonesia yang menyebabkan banyak korban jiwa antara lain konflik Poso, konflik Ambon, konflik Tolikara, konflik Lampung (Kumparan, 2023). Dengan demikian, peran Polri dalam pencegahan konflik antarumat beragama merupakan hal yang sangat penting sebagai upaya menjaga stabilitas kamtibmas.

Dalam rangka pencegahan konflik antarumat beragama sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas kamtibmas, perlu dilakukan pendidikan HAM kepada anggota kepolisian dan juga masyarakat. Pendidikan HAM dapat dilakukan oleh internal kepolisian maupun melibatkan pihak eksternal misalnya Komnas HAM atau organisasi masyarakat yang bergerak di bidang HAM. Pendidikan HAM sebenarnya telah diberikan dalam setiap pendidikan pembentukan anggota Polri. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu dan lama penugasan, anggota Polri bisa saja melupakan pelajaran HAM tersebut. Oleh karena itu, sebagai bentuk penyegaran pengetahuan HAM, diperlukan pendidikan HAM yang konsisten dan berkesinambungan agar anggota Polri dapat selalu menjunjung tinggi HAM dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Di sisi lain, masyarakat pun harus diberikan pemahaman mengenai HAM sehingga diharapkan lebih menghormati hak-hak asasi orang lain sehingga dapat mencegah berbagai konflik di Indonesia.

B. Rumusan Masalah.

1. Permasalahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan permasalahan pada Naskah Karya Perseorangan (NKP) ini adalah “Bagaimana pendidikan hak asasi manusia guna mencegah konflik antarumat beragama dalam rangka menjaga stabilitas kamtibmas?”

2. Pokok-pokok persoalan.

Pokok-pokok persoalan dalam NKP ini adalah sebagai berikut:

2.1 Bagaimana perencanaan pendidikan hak asasi manusia di Polres Purwakarta?

2.2 Bagaimana pengorganisaisan pendidikan hak asasi manusia di Polres Purwakarta?

2.3 Bagaimana pelaksanaan pendidikan hak asasi manusia di Polres Purwakarta?

2.4 Bagaimana pengendalian pendidikan hak asasi manusia di Polres Purwakarta?

C. Ruang Lingkup dan Sistematika.

1. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Naskah Karya Perseorangan (NKP) ini adalah sebagai berikut:

1.1. Kajian materi/substansi teori yang digunakan yaitu teori *Social Learning Theory* (Bandura. A., 1977), *Behaviorisme Theory* (Skinner, B.F., 1954), *Self-Efficacy Theory* (Zimmerman, B.J., 2000), *Ecology Theory* (Bronfenbrenner, U., 1979).

1.2. Lokasi penelitian yaitu di Polres Purwakarta

1.3. Waktu penelitian yaitu tahun anggaran 2020 s.d. 2022

1.4. Batasan pembahasan setiap persoalan adalah terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian pendidikan hak asasi manusia.

.

2. Sistematika.

2.1 BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pentingnya menjaga stabilitas kamtimbas dengan cara melakukan pencegahan konflik antarumat beragama. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi konflik yang lebih luas dan memakan korban jiwa. Pencegahan konflik antarumat

beragama ini dilakukan melalui pendidikan kepada anggota polri dan masyarakat.

2.2 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai hubungan mata pelajaran yang diajarkan dengan Naskah Karya Perseorangan, kajian teori mulai dari grand theory, middle theory dan applied theory, seta pengumpulan, analisis data dan metode penelitian.

2.3 BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai kondisi faktual antara kelompok kata ke-3, ke-2 dan ke-1 beserta persoalan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2.4 BAB IV : PEMECAHAN MASALAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai analisis, formulasi, impelemtasi strategi beserta evaluasi dan pengendaliannya. Selain itu, tentu saja break down dari masing-masing sub-subjudul agar penjelasan menjadi lebih sistematis.

2.5 BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai mengenai simpulan atas bahasan pada Naskah Karya Perseorangan dan juga rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari pembahasan maupun ide gagasan yang tidak bisa dilakukan pada level Kapolres.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Mata Pelajaran dengan Naskah.

Peran Polri dalam perlindungan Hak Asasi Manusia sangat penting karena Polri harus menjaga keadilan, keamanan, dan martabat kemanusiaan di Indonesia. Beberapa peran Polri dalam perlindungan Hak Asasi Manusia antara lain:

a. Penegakan hukum dan pencegahan perlanggaran HAM.
b. Investigasi dan penuntutan pelanggaran HAM.
c. Perlindungan Korban Pelanggaran HAM.
d. Pelatihan dan pendidikan HAM bagi aparat kepolisian.
e. Kolaborasi dengan institusi HAM dan masyarakat sipil.
f. Penegakan HAM dalam Operasi Kepolisian.

Konflik ideologi adalah benturan atau ketegangan yang terjadi antara kelompok atau individu yang memiliki keyakinan, pandangan, atau ideologi yang berbeda. Beberapa poin penting dalam menjelaskan konflik ideologi antara lain:

a. Konflik ideologi dapat berasal dari perbedaaan dalam keyakinan politik, agama, ekonomi, sosial, budaya atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut.
b. Konflik ideologi sering kali melibatkan persaingan antara ideologi-ideologi yang saling bertentangan atau bersaing untuk memengaruhi dan mendominasi opini publik.
c. Konflik ideologi dapat memiliiki dampak sosial dan politik yang signifikan.
d. Mengelola konflik ideologi membutuhkan pendekatan yang inklusif, berbasis dialog, dan mempromosikan toleransi antara kelompok dan individu yang memiliki ideologi berbeda.
e. Dalam konteks penanganan konflik ideologi, Polri memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, mencegah kekerasan, dan memastikan keadilan.

B. Kajian Teori.

1. *Grand Theory.*

Untuk mengupas permasalahan pada Naskah Karya Perseorangan ini, penulis menggunakan *Grand Theory* sebagai pisau analisis yaitu teori *Social Learning Theory* dikembangan oleh Albert Bandura pada tahun 1977 dalam bukunya yang berjudul *Social Learning Theory*.

Social Learning Theory adalah teori pembelajaran yang menekankan pentingnya pengaruh lingkungan sosial dalam proses pembelajaran dan perkembangan perilaku. Teori ini mengklaim bahwa individu belajar dengan cara mengamati orang lain di sekitarnya dan meniru perilaku yang mereka lihat.

Dalam teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Bandura, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pembelajaran dan perkembangan perilaku, yaitu *behavioral factors* (faktor perilaku), *personal factors* (faktor pribadi), dan *environmental factors* (faktor lingkungan).

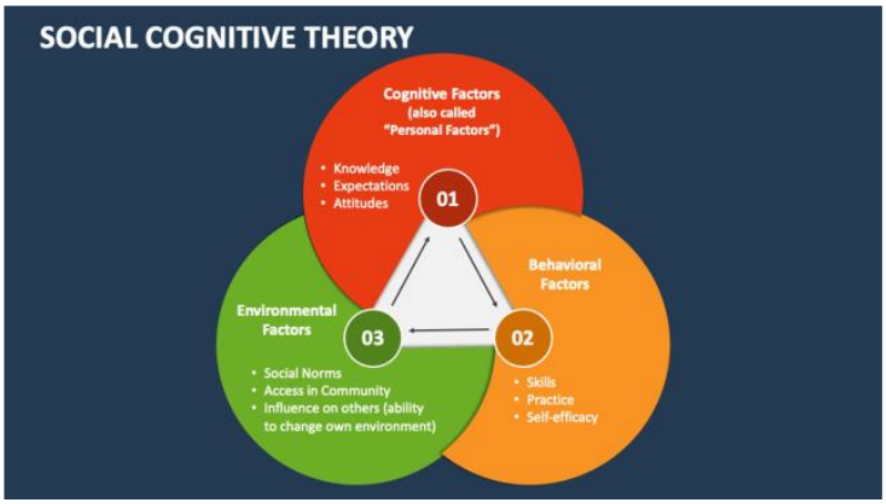
1.1. Faktor perilaku menekankan pentingnya observasi perilaku dan pengaruhnya terhadap pembelajaran. Individu belajar melalui pengamatan perilaku orang lain di sekitarnya. Ketika individu melihat orang lain melakukan sesuatu, mereka dapat meniru dan mengadopsi perilaku tersebut. Faktor perilaku ini menekankan betapa pentingnya peran model perilaku dalam membentuk dan mempengaruhi perilaku individu.

1.2. Faktor pribadi mencakup karakteristik pribadi setiap individu yang mempengaruhi pembelajaran dan perkembangan perilaku. Misalnya, faktor kognitif seperti kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan sikap yang dimiliki individu dapat mempengaruhi apakah mereka akan meniru dan mengadopsi perilaku yang diamati. Selain itu, faktor-faktor pribadi seperti kemampuan kognitif, kepribadian, dan motivasi juga berperan penting dalam pembelajaran sosial.

1.3. Faktor lingkungan mencakup konteks sosial dan fisik di mana individu berada. Lingkungan sosial meliputi pengaruh dan interaksi dengan keluarga, teman sebaya, guru, atau komunitas. Lingkungan fisik mencakup aspek fisik dari lingkungan seperti lokasi geografis, infrastruktur, dan sumber daya yang tersedia. Faktor lingkungan ini dapat mempengaruhi pembelajaran dan pengembangan perilaku melalui pengaruh yang diberikan oleh orang-orang di sekitar individu dan kondisi lingkungan yang mendukung atau menghambat pembelajaran.

Dalam teori pembelajaran sosial Bandura, ketiga faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Observasi perilaku, faktor pribadi, dan pengaruh lingkungan bekerja bersama-sama dalam membentuk pembelajaran dan perkembangan perilaku individu. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal individu, tetapi juga oleh pengaruh lingkungan eksternal dan model perilaku yang ada di sekitarnya.

Gambar 2.1 Model hubungan *Social Cognitive Theory*



Sumber: Bandura, 1977.

2. *Middle Theory.*

Dari *grand theory* yang telah dipilih, penulis akan menjelaskan beberapa *middle theory* sebagai pisau analisis untuk menjawab pokok-pokok persoalan yang timbul dari pemilihan *grand theory* sebelumnya. Adapun *middle theory* yang digunakan adalah sebagai berikut:

2.1 *Behaviorisme Theory*

Behaviorisme adalah teori psikologis yang dikembangkan oleh B.F. Skinner pada tahun 1954. Menurut teori ini, perilaku manusia dapat dipahami dan diperoleh melalui pengamatan dan analisis reaksi yang terjadi antara individu dan lingkungannya. Skinner mengemukakan bahwa perilaku manusia dapat ditebak, dikontrol, dan dimodifikasi melalui penerapan stimulus dan respons dalam situasi tertentu. Menurut teori ini, pembelajaran terjadi melalui penguatan (*reinforcement*), di mana perilaku yang diberi penguatan positif akan cenderung muncul kembali. Skinner juga mengemukakan pentingnya pengaturan lingkungan yang tepat dalam membentuk perilaku yang diinginkan. Dengan demikian, *Behaviorisme* menyajikan pemahaman yang berfokus pada observasi perilaku eksternal dan pengaruh lingkungan dalam pembentukan dan perubahan perilaku individu.

2.2 *Self-Efficacy Theory*

Teori Efikasi Diri (*Self-Efficacy*) yang dikemukakan oleh B.J. Zimmerman pada tahun 2000 berfokus pada keyakinan individu terhadap kemampuan diri untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan tertentu. Menurut teori ini, individu cenderung akan lebih termotivasi dan berkinerja baik jika mereka memiliki keyakinan yang kuat terhadap kemampuan diri. Keyakinan efikasi diri ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman

sebelumnya, observasi terhadap orang lain, persuasi verbal, dan keadaan fisik atau emosional. Teori Efikasi Diri menjelaskan bahwa individu yang memiliki keyakinan efikasi diri yang tinggi akan cenderung menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri, menetapkan tujuan yang lebih ambisius, dan bekerja lebih keras untuk mencapai kesuksesan.

2.3 *Ecology Theory*

Teori Ekologi (*Ecology Theory*) yang dikemukakan oleh Urie Bronfenbrenner pada tahun 1979 menjelaskan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara individu dan lingkungan yang lebih luas. Menurut teori ini, individu berada dalam "sistem ekologi" yang terdiri dari beberapa lingkungan yang saling berhubungan, seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya pemahaman konteks sosial, budaya, dan sejarah dalam memahami pengaruh lingkungan terhadap pembelajaran dan perkembangan individu. Bronfenbrenner menggambarkan individu sebagai pusat dari sistem lingkungan yang terus berinteraksi dan beradaptasi satu sama lain. Dalam teori ini, perubahan dalam satu aspek lingkungan dapat memiliki dampak yang luas pada perkembangan individu dengan cara yang kompleks dan saling terkait dalam berbagai tingkatan.

3. *Applied Theory.*

3.1 *Cognitive Development Theory*

Teori Perkembangan Kognitif (*Cognitive Development Theory*) yang dikemukakan oleh Jean Piaget pada tahun 1977 menjelaskan bagaimana individu mengembangkan pemahaman dan pengetahuan mereka

melalui proses kognitif yang berbeda pada tahap-tahap perkembangan yang berbeda. Menurut teori ini, individu aktif dalam membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan fisik dan sosial mereka. Piaget mengidentifikasi empat tahap perkembangan kognitif, yaitu tahap sensorimotor, tahap praoperasional, tahap konkret operasional, dan tahap formal operasional. Setiap tahap memiliki karakteristik dan kemampuan berpikir yang khas. Teori ini menekankan pentingnya aktivitas eksplorasi dan konstruksi pengetahuan serta berfokus pada bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan dan membangun pemahaman mereka tentang dunia di sekitarnya..

3.2 *Self-Determination Theory*

Teori *Self-Determination* (Deci, E.L., & Ryan, R.M., 1985) adalah sebuah teori motivasi yang menekankan pentingnya pemenuhan tiga kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan otonomi, kompetensi, dan hubungan yang erat. Menurut teori ini, ketika individu merasa memiliki kontrol penuh atas tindakan mereka (otonomi), mampu mencapai tujuan dan merasa kompeten dalam melakukannya, serta memiliki hubungan yang saling mendukung dengan orang lain, mereka akan merasa lebih termotivasi dan mencapai kepuasan diri yang tinggi.

3.3 *Social Control Theory*

Teori *Social Control* (Hirschi T., 1969) adalah sebuah teori yang mengemukakan bahwa tingkat komitmen individu terhadap norma-norma sosial dan kontrol sosial yang diterima akan mempengaruhi tingkat perilaku devian. Hirschi berpendapat bahwa individu yang memiliki ikatan positif dengan masyarakat, termasuk ikatan terhadap lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, dan tempat kerja,

akan cenderung menjaga perilaku yang sesuai dengan aturan sosial yang ada. Dalam teori ini, terdapat empat elemen utama yang mempengaruhi tingkat social control, yaitu ikatan, komitmen, partisipasi, dan keyakinan terhadap aturan-aturan yang ada.

Tabel 2.1
Hubungan *Grand Theory, Middle Theory,* dan *Applied Theory*

Grand Theory	*Social Learning Theory* (Bandura. A., 1977)		
Middle Theory	*Behaviorisme Theory* (Skinner, B.F., 1954)	*Self-Efficacy Theory* (Zimmerman, B.J., 2000)	*Ecology Theory* (Bronfenbrenner, U., 1979)
Applied Theory	*Cognitive Development Theory* (Piaget, J., 1977)	*Self-Determination Theory* (Deci, E.L., & Ryan, R.M., 1985)	*Social Control Theory* (Hirschi T., 1969)

C. Pengumpulan, analisis data dan metode penelitian.

1. Mengumpulkan dan mengolah data.

Dalam pengumpulan data, perlu dianalisis pengaruh lingkungan yang sedang dihadapi oleh organisasi. Pendekatan konsep *strategic analysis* digunakan untuk menganalisis lingkungan tersebut, yang meliputi *Environmental Scanning* (ES) dan *Organization Health Audit* (OHA). Lingkungan eksternal (ES) dianalisis dengan menggunakan *tools* seperti PESTEL, untuk memahami lingkungan politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan hukum. Sedangkan lingkungan internal (OHA) dianalisis menggunakan konsep manajemen 5M untuk mengetahui dan mengukur kekuatan dan kelemahan organisasi.

Setelah melakukan *Environmental Scanning* dan *Organization Health Audit*, analisis dilakukan terhadap faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat menjadi peluang atau ancaman. Peluang merupakan faktor positif yang di luar kendali organisasi dan memberikan kesempatan bagi organisasi untuk memanfaatkannya. Sedangkan ancaman adalah faktor negatif

yang berada di luar kendali organisasi dan dapat menjadi penghambat atau mendatangkan resiko tertentu bagi organisasi.

2. Analisis data/fakta.

Setelah mengumpulkan dan mengolah data, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis SWOT dengan memilih faktor yang dianggap paling berpengaruh terhadap organisasi, masing-masing 5 faktor. Analisis ini bertujuan untuk mendukung perumusan strategi umum/*generic strategy* dengan melihat berbagai fakta lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi keberlangsungan organisasi. Analisis SWOT meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang perlu diperhatikan dalam perumusan strategi organisasi.

3. Metode penelitian.

Dalam penulisan Naskah Karya Perseorangan (NKP) yang bersifat pemecahan masalah, digunakan metode deskriptif analisis secara komprehensif dan integral. Pendekatan pemecahan masalah terlihat dari sisi mana titik berat penulis dalam merumuskan pemecahan masalah yang sesuai dengan pokok persoalan yang ditentukan.

D. Kerangka Berpikir.



BAB III
PEMBAHASAN

A. Kondisi Faktual Menjaga Stabilitas Kamtibmas.

Berdasarkan LKIP Polres Purwakarta T.A. 2020 s.d. 2022, kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Purwakarta secara umum tergolong baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Polres Purwakarta Tahun 2020 s.d. 2022

Sasaran Strategis		Indikator		Variabel	Target			Realisasi		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022
S1	Keamanan dan Ketertiban	IKU Polri	Indeks Kamtib Kabupaten		3,47	3,50	3,57	4,03	4,41	4,49
				Indeks Harkamtibmas	75,00	70,00	71,00	65,81	89,66	96,18
				Indeks Gakkum	62,32	70,00	72,00	99,53	86,39	81,54

Sumber: LKIP Polres Purwakarta (Diolah)

Komponen pembentuk indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Purwakarta adalah indeks Harkamtibmas dan indeks Gakkum. Dengan demikian, untuk memantapkan ketertiban dan keamanan masyarakat Kab. Purwakarta dapat dengan meningkatkan indeks Harkamtibmas maupun indeks Gakkum. Dalam NKP ini, penulis mengambil hubungan pencegahan konflik antarumat beragama sebagai bentuk pemeliharaan kamtibmas.

Tabel 3.2
Data 4 Jenis Kajahatan Polres Purwakarta Tahun 2020 s.d. 2022

No.	Jenis Kejahatan	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Konvensional	1057	988	1204
2.	Transnasional	84	87	78
3.	Kekayaan negara	1	4	0
4.	Implikasi kontinjensi	0	0	0

Sumber: Data Gangguan Kamtibmas Polres Purwakarta (Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada konflik sosial yang berimplikasi kontinjensi pada tiga tahun terakhir. Dengan

demikian, Polres Purwakarta berhasil melakukan pencegahan konflik antarumat beragama dengan baik.

B. Kondisi Faktual Pencegahan Konflik Antarumat Beragama.

Polres Purwakarta telah melakukan pencegahan konflik antarumat beragama sebagaimana dari tabel berkut ini:

Tabel 3.3
Data Konflik Antarumat Beragama

NO	PIHAK YG BERKONFLIK	LOKASI KEJADIAN	URAIAN KEJADIAN	KETERANGAN
1	3	4	5	7
1.	Keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)	Desa Cijati Kec. Maniis kab Purwakarta. Pimpinan Ayi Munasir Ahmad Jemaat : 63	Adanya Aksi dari kelompk Islam garis keras untuk menentang keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. - Adanya penolakan masyarakat sekitar lokasi kelompok JAI karena dianggap sebagai aliran sesat - Adanya kegiatan-kegiatan dari Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang dapat menimbulkan konflik Horizontal.	Keterlibatan Unsur Pemerintah harus ada
2.	Organisasi Syiah	Di Wilayah Kab Purwakarta	Adanya kelompok ormas Islam yang tidak setuju atau menentang terhadap organisasi Syiah. Terjadi aksi main hakim sendiri oleh kelompk Islam garis keras terhadap Organisasi Syiah terutama ketika melaksanakan kegiatan perayaan hari Asyura.	
3.	TK Plangi Kasih yang digunakan sarana Ibadah bagi Umat Kristiani GKBP Surya Pengharapan	Jl Taman Pahlawan Kec. BBC Purwakarta	Adanya penolakan dari Masyarakat sekitar Lokasi TK Plangi Kasih GKBP Surya Pengharapan. Adaya aksi pengrusakan oleh masyarakat sekitar terhadap bangunan TK Plangi Kasih. - Terjadinya Aksi dari Ormas Islam terkait keberadaan lokasi TK Plangi yang di gunakan sebagai tempat ibadah umat Kristiani GKBP Surya Pengharapan.	
4.	Rencana Pembangunan Tempat Ibadah Umat Kristen Gereja Batak Karo Protestan (GBKP)	Rt.04 Rw.03 Ds.Ciwareng Kec. Babakan cikao Kab.Purwakarta.	adanya rencana pembangunan tempat ibadah umat Kristen (Gereja) Adanya surat penolakan dari Ds. Ciwareng no. 141.1/113/Pem perihal Penolakan Perizinan Pembangunan Gereja.	
5.	Adanya kelompok Islam garis keras yang selalu mengkritik kebijakan dari Pemerintah baik Pusat maupun Daerah	Kelompok eks HTI, eks FPI, PUP, PA 212 Kelompok Islam garis keras lainnya. Yang berada di wilayah Kab Purwakarta.	Adanya kelompok Islam yang sering melakukan kegiatan aksi dengan mengangkat isue kebijakan pemerintah yang di pandang bertolak belakang dengan syariah Islam. Giat Tabligh Akbar rutin yang dilakukan oleh kelompok	

			Manhajus Sholihin yang dalam ceramahnya selalu Menghujat terhadap kebijakan pemerintah baik lokal maupun pusat.	

Sumber: Data Intelkam Polres Purwakarta (Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa potensi konflik antarumat beragama telah dipetakan oleh polres Purwakarta dalam rangka mencegah konflik semakin memburuk. Walaupun polres Purwakarta telah melakukan pencegahan konflik antarumat beragama dengan baik, potensi-potensi konflik tersebut bisa menjadi konflik terbuka apabila ada kejadian pemicu/*trigger* yang tak dapat ditangani dengan baik dan cepat. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mencegah konflik antarumat beragama adalah dengan melakukan pendidikan HAM dengan asumsi bahwa apabila seluruh umat beragama memahami hak asasi setiap orang dan menghargainya maka gesekan-gesekan yang dapat memicu konflik akan hilang. Sebagai contoh, tidak ada lagi penyegelan rumah ibadah.

C. Kondisi Faktual Pendidikan Hak Asasi Manusia.

Selain pelajaran Hak Asasi Manusia yang dipelajari pada pendidikan pembentukan anggota Polri, baik perwira maupun bintara, pernah diadakan pendidikan Hak Asasi Manusia ataupun pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pencegahan atau penanganan konflik sosial sebelum tahun 2020. Akan tetapi, setelah tahun 2020, belum pernah ada lagi pendidikan Hak Asasi Manusia ataupun pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pencegahan atau penanganan konflik sosial yang diberikan kepada personil polres Purwakarta.

Tabel 3.4
Data Pendidikan dan Pelatihan Personel Polres Purwakarta

No.	Jenis Kejahatan	Tahun	
		Sebelum 2020	Setelah 2020
1.	Pelatihan HAM	15	0
2.	Latba Penyuluhan Masyarakat	5	0

3.	Pelatihan Pa Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)	1	0
4.	Pelatihan Ba Penanganan Radikalisme	1	0
5.	Pelatihan Ba Deteksi Aksi Pok Radikal	2	0
6.	Lat Deteksi Aksi Dok Radikal	1	0

Sumber: Data Pelatihan Bag SDM Polres Purwakarta (Diolah)

Berdasarkan uraian-uraian kondisi faktual di atas, dapat dijabarkan persoalan-persoalan serta faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kondisi-kondisi tersebut antara lain:

1. Persoalan.

1.1 Perencanaan pendidikan hak asasi manusia di Polres Purwakarta

Seluruh pendidikan dan pelatihan diambil alih oleh Polda sehingga Polres tidak memiliki anggaran untuk melakukan pendidikan Hak Asasi Manusia ataupun pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pencegahan atau penanganan konflik sosial. Apabila akan dilaksanakan latihan peningkatan kemampuan atau pendidikan Hak Asasi Manusia ataupun pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pencegahan atau penanganan konflik sosial bisa diusulkan menggunakan dukungan anggaran Kapolres. Untuk merencanakannya, Kabag SDM dapat menyampaikan nota dinas kepada Kapolres untuk diberikan dana dukgar Kapolres.

Untuk penyuluhan kepada masyarakat dapat dilakukan oleh satuan Binmas. Akan tetapi, anggaran Pemberdayaan Pembinaan Potkam yang ada, tidak spesifik khusus terkait pendidikan Hak Asasi Manusia ataupun pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pencegahan atau penanganan konflik sosial. Berikut adalah tabel anggaran Pemberdayaan Pembinaan Potkam tahun 2020 s.d. 2022.

Tabel 3.5
Besaran Anggaran Pemberdayaan Pembinaan Potkam

No.	Program	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Pemberdayaan Pembinaan Potkam	2.556.635.000	2.362.145.000	2.284.625.000

Sumber: DIPA Polres Purwakarta

1.2 Pengorganisaisan pendidikan hak asasi manusia di Polres Purwakarta

Kabag SDM dapat menginisiasi pendidikan HAM/pelatihan peningkatan kemampuan personil anggota polres dengan mengirimkan nota dinas kepada Kapolres untuk selanjutnya disetujui oleh Kapolres terkait rencana kegiatan dan penggunaan dukungan anggaran Kapolres. Selanjutnya, Kabag SDM dapat mengirimkan nota dinas permintaan nama-nama personil yang akan diberikan pelatihan HAM kepada para kasat.

Terhadap personil SDM, kabag SDM dapat memerintahkan untuk menyelenggarakan pendidikan Hak Asasi Manusia ataupun pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pencegahan atau penanganan konflik sosial tersebut. Selanjutnya dapat menentukan pemateri apakah dari internal polres atau dari external, misalnya dosen universitas setempat.

Pendidikan Hak Asasi Manusia ataupun pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pencegahan atau penanganan konflik sosial terhadap komunitas atau kelompok masyarakat dapat dilakukan oleh personil Sat Binmas. Personil Sat Binmas dapat memberikan pendidikan HAM kepada masyarakat pada saat kegiatan binluh atau sambang.

1.3 Pelaksanaan pendidikan hak asasi manusia di Polres Purwakarta

Pelaksanaan pendidikan Hak Asasi Manusia ataupun pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pencegahan atau penanganan konflik sosial bagi personil polres Purwakarta dilakukan melalui pelatihan peningkatan kemampuan karena pendidikan sudah diambilalih oleh Polda. Pemberian pelatihan peningkatan kemampuan yang dilakukan internal Polres dirasa belum cukup sehingga dibutuhkan pendidikan yang diberikan oleh Polda.

Untuk masyarakat Purwakarta, binluh dan sambang terkait pendidikan Hak Asasi Manusia ataupun pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pencegahan atau penanganan konflik sosial telah dilaksanakan oleh personil Sat Binmas polres Purwakarta.

1.4 Pengendalian pendidikan hak asasi manusia di Polres Purwakart

Kapolres salaku penanggung jawab seluruh program kegiatan dapat mendelegasikan pengendalian pelatihan peningkatan kemampuan/pendidikan Hak Asasi Manusia ataupun pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pencegahan atau penanganan konflik sosial kepada Wakapolres dan Sie propam. Sehingga walaupun Kapolres tidak turun langsung, pengawasan kegiatan tetap bisa dilaksanakan. Selanjutnya, Wakapolres atau Sie propam melaporkan hasil pengawasanya kepada Kapolres.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi.

2.1 Faktor Eksternal.

2.1.1 Peluang.

a. Adanya bantuan Pemda.

b. Adanya dukungan universitas.

c. Kepercayaan masyarakat tinggi.
d. Kerjasama dengan lembaga keagamaan.
e. Perkembangan IT.

2.1.2 Ancaman

a. Eks organisasi terlarang.
b. Gesekan antarumat beragama.
c. Banyaknya hoax.
d. Rumah ibadah tak berizin.
e. Sulit menendapatkan izin pendirian rumah ibadah.

2.2 Faktor Internal.

2.2.1 Kekuatan.

a. Inisiatif Kabag SDM.
b. Dukungan anggaran Kapolres.
c. Pernah mendapatkan pendidikan HAM.
d. Adanya pelatihan penanganan radikalisme.
e. Pemetaan konflik yang baik.

2.2.2 Kelemahan.

a. Tidak ada anggaran pendidikan.
b. Jarangnya pendidikan HAM dari satuan atas.
c. Personil yang pernah mengikuti pelatihan sangat sedikit.
d. Tidak ada buku atau SOP penanganan konflik.
e. Sedikitnya kendaraan taktis.

BAB IV
PEMECAHAN MASALAH

A. Analisis Strategi.

Analisa strategi/*strategic analysis* digunakan untuk menganalisis lingkungan tersebut, yang meliputi Environmental Scanning (ES) dan Organization Health Audit (OHA). Lingkungan eksternal (ES) dianalisis dengan menggunakan tools seperti PESTEL, untuk memahami lingkungan politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan hukum. Sedangkan lingkungan internal/kesehatan organisasi (OHA) dianalisis untuk mengetahui dan mengukur kekuatan dan kelemahan organisasi.

1. Faktor Eksternal

1.1 *External Factors Analysis Summary* (EFAS).

EFAS adalah sebuah metode analisis yang digunakan untuk melakukan evaluasi eksternal terhadap kondisi organisasi. Metode ini melibatkan penilaian berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi berbagai aspek keberlangsungan organisasi. Dalam metode EFAS, analisis dilakukan dengan memberikan pembobotan (berdasarkan bobot pada AHP Faktor Eksternal) pada berbagai faktor eksternal dan mencapai skor akhir untuk menentukan faktor peluang dan ancaman yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat memberikan ringkasan analisis yang lebih terfokus dan terukur terhadap kondisi eksternal organisasi.

Tabel 4.1
***External Factors Analysis Summary* (EFAS)**

No.	Peluang	Bobot	Rating	Skor
1.	Adanya bantuan Pemda.	0,109	7	0,760
2.	Adanya dukungan universitas.	0,099	6	0,596
3.	Kepercayaan masyarakat tinggi.	0,115	7	0,808

4.	Kerjasama dengan lembaga keagamaan.	0,083	7	0,582
5.	Perkembangan IT.	0,093	6	0,561
	Sub Total	**0,500**		**3,307**
No.	**Ancaman**	**Bobot**	**Rating**	**Skor**
1.	Eks organisasi terlarang.	0,133	4	0,534
2.	Gesekan antarumat beragama.	0,146	2	0,291
3.	Banyaknya hoax.	0,069	3	0,208
4.	Rumah ibadah tak berizin.	0,105	2	0,210
5.	Sulit menendapatkan izin pendirian rumah ibadah.	0,047	1	0,047
	Sub Total	**0,500**		1,289
	Total EFAS	**1,000**		4,597

Berdasarkan perhitungan tabel 4.1 di atas, faktor-faktor lingkungan eksternal yang telah diberi bobot dan rating menghasilkan skor total EFAS sebesar 4,597.

1.2 *Analytical Hierarchy Process (AHP)* Faktor Eksternal.

AHP ini adalah sebuah alat atau metode yang digunakan untuk menentukan bobot faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan eksternal, baik dalam bentuk peluang (*Opportunities*) maupun ancaman (*Threats*).

Tabel 4.2
***Analytical Hierarchy Process* (AHP) Faktor Eksternal**

No.	Peluang	A	B	C	D	E	Bobot
1.	Adanya bantuan Pemda.	1,000	1,167	0,857	1,333	1,167	0,109
2.	Adanya dukungan universitas.	0,857	1,000	0,857	1,167	1,167	0,099
3.	Kepercayaan masyarakat tinggi.	1,167	1,167	1,000	1,333	1,167	0,115
4.	Kerjasama dengan lembaga keagamaan.	0,750	0,857	0,750	1,000	0,857	0,083
5.	Perkembangan IT.	0,857	0,857	0,857	1,167	1,000	0,093

	Sub Total						0,500
No.	**Ancaman**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**Bobot**
1.	Eks organisasi terlarang.	1,000	0,667	1,500	3,000	2,000	0,133
2.	Gesekan antarumat beragama.	1,500	1,000	2,000	1,333	3,000	0,146
3.	Banyaknya hoax.	0,667	0,500	1,000	0,667	1,333	0,069
4.	Rumah ibadah tak berizin.	0,333	0,750	1,500	1,000	4,000	0,105
5.	Sulit menendapatkan izin pendirian rumah ibadah.	0,500	0,333	0,750	0,250	1,000	0,047
	Sub Total						0,500

Tabel 4.2 di atas merupakan nilai-nilai hasil perbandingan berpasangan faktor-faktor eksternal berupa peluang dan ancaman sehingga menghasilkan bobot masing-masing faktor yang dimasukan ke dalam tabel EFAS sebelumnya.

2. Faktor Internal

2.1 *Internal Factors Analysis Summary* (IFAS).

IFAS adalah sebuah metode analisis yang digunakan untuk melakukan evaluasi internal terhadap kondisi organisasi. Metode ini melibatkan penilaian berbagai faktor internal yang mempengaruhi berbagai aspek keberlangsungan organisasi. Dalam metode IFAS, analisis dilakukan dengan memberikan pembobotan (berdasarkan bobot pada AHP Faktor Internal) pada berbagai faktor internal dan mencapai skor akhir untuk menentukan faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat memberikan ringkasan analisis yang lebih terfokus dan terukur terhadap kondisi internal organisasi.

Tabel 4.3
***Internal Factors Analysis Summary* (IFAS)**

No.	Kekuatan	Bobot	Rating	Skor
1.	Inisiatif Kabag SDM.	0,095	8	0,756
2.	Dukungan anggaran Kapolres.	0,112	7	0,784
3.	Pernah mendapatkan pendidikan HAM.	0,097	8	0,774
4.	Adanya pelatihan penanganan radikalisme.	0,105	7	0,737
5.	Pemetaan konflik yang baik.	0,091	7	0,640
	Sub Total	**0,500**		**3,691**
No.	**Kelemahan**	**Bobot**	**Rating**	**Skor**
1.	Tidak ada anggaran pendidikan.	0,130	5	0,648
2.	Jarangnya pendidikan HAM dari satuan atas.	0,063	4	0,252
3.	Personil yang pernah mengikuti pelatihan sangat sedikit.	0,105	3	0,314
4.	Tidak ada buku atau SOP penanganan konflik.	0,123	5	0,616
5.	Sedikitnya kendaraan taktis.	0,079	4	0,317
	Sub Total	**0,500**		2,148
	Total EFAS			5,839

Berdasarkan perhitungan tabel 4.3 di atas, faktor-faktor lingkungan internal yang telah diberi bobot dan rating menghasilkan skor total IFAS sebesar 5,839.

2.2 *Analytical Hierarchy Process (AHP) Faktor Internal.*

AHP ini adalah sebuah alat atau metode yang digunakan untuk menentukan bobot faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan internal, baik dalam bentuk kekuatan (*Strength*) maupun kelemahan (*Weakness*).

Tabel 4.4
***Analytical Hierarchy Process (AHP)* Faktor Internal**

No.	Kekuatan	A	B	C	D	E	Bobot
1.	Inisiatif Kabag SDM.	1,000	1,167	0,857	0,857	0,857	0,095

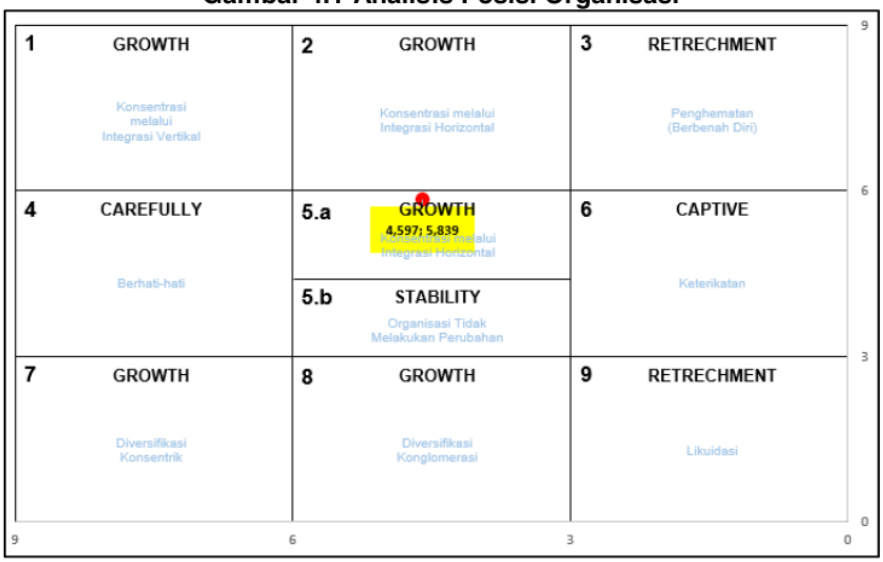
2.	Dukungan anggaran Kapolres.	0,857	1,000	1,333	1,143	1,333	0,112
3.	Pernah mendapatkan pendidikan HAM.	1,167	0,750	1,000	0,875	1,143	0,097
4.	Adanya pelatihan penanganan radikalisme.	1,167	0,875	1,143	1,000	1,167	0,105
5.	Pemetaan konflik yang baik.	1,167	0,750	0,875	0,857	1,000	0,091
	Sub Total						0,500
No.	**Kelemahan**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**Bobot**
1.	Tidak ada anggaran pendidikan.	1,000	1,500	1,500	1,333	1,500	0,130
2.	Jarangnya pendidikan HAM dari satuan atas.	0,667	1,000	0,667	0,500	0,500	0,063
3.	Personil yang pernah mengikuti pelatihan sangat sedikit.	0,667	1,500	1,000	0,800	2,000	0,105
4.	Tidak ada buku atau SOP penanganan konflik.	0,750	2,000	1,250	1,000	2,000	0,123
5.	Sedikitnya kendaraan taktis.	0,667	2,000	0,500	0,500	1,000	0,079
	Sub Total						0,500

Tabel 4.4 di atas merupakan nilai-nilai hasil perbandingan berpasangan faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan sehingga menghasilkan bobot masing-masing faktor yang dimasukan ke dalam tabel IFAS sebelumnya.

3. Analisis Posisi Organisasi.

Setelah EFAS dan IFAS dihitung berdasarkan tabel 4.1 dan 4.3 di atas, posisi organisasi dapat ditentukan sesuai dengan gambar berikut ini:

Gambar 4.1 Analisis Posisi Organisasi



Berdasarkan gambar 4.1 di atas, dengan nilai EFAS sebesar 4,597 dan IFAS sebesar 5,839, posisi organisasi dinyatakan berada pada sel 5a. Artinya, kondisi organisasi dikatakan sedang-sedang saja. Lingkungan eksternal memberikan peluang yang sedang-sedang saja, sementara secara internal organisasi memiliki kekuatan yang juga sedang-sedang saja. Karena posisi organisasi berada di kuadran 5a (Strategi Integrasi Horizontal), maka dalam bahasa operasional, kata yang digunakan adalah OPTIMALISASI.

4. Faktor Strategi.

Strategic Factors Analysis Summary (SFAS).

Berdasarkan perhitungan EFAS dan IFAS sebelumnya, maka penulis mengambil 10 strategi yang nilai bobotnya 0,110 atau di atasnya. Apabila belum cukup 10 strategi maka ditambah yang memiliki bobot rendah dan kemudian atas penilaian profesional jugdement penulis merupakan hal yang strategis.

Tabel 4.5
***Strategic Factors Analysis Summary* (SFAS)**

No.	Faktor-Faktor Strategi Kunci	Bobot	Rating	Score	Jangka		
					Pdk	Sdg	Pjg
1.	**Mengeliminasi** gesekan antarumat beragama.	0,127	5	0,635			
2.	**Mengawasi** eks organisasi terlarang.	0,089	4	0,358			
3.	**Menginisiasi** anggaran pendidikan.	0,077	5	0,385			
4.	**Merancang** buku atau SOP penanganan konflik.	0,071	4	0,285			
5.	**Menjamin** kepercayaan masyarakat tetap tinggi.	0,071	2	0,142			
6.	**Mengelola** dukungan anggaran Kapolres.	0,075	2	0,150			
7.	**Menginisiasi** perizinan rumah ibadah	0,134	7	0,938			
8.	**Meningkatkan jumlah** personil yang pernah mengikuti pelatihan.	0,135	9	1,214			
9.	**Mengelola** dukungan universitas.	0,120	4	0,480			
10.	**Menggerakkan** anggota yang pernah mendapatkan pendidikan HAM.	0,100	1	0,100			

Berdasarkan perhitungan antara bobot dan rating yang menghasilkan nilai score maka penentuan strategi jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang, yaitu:

a. Nilai median yaitu skor tertinggi 1,214 dikurangi skor terendah 0,100 dibagi 3 sama dengan 0,371.

b. Strategi jangka pendek: 0,100 + 0,371= 0,471; Range strategi jangka pendek 0,100 s.d. 0,471.

c. Strategi jangka panjang. 1,214 – 0,371= 0,843; Range strategi jangka panjang 0,843 s.d. 1,214.

d. Strategi jangka sedang yaitu di antara jangka pendek dan jangka panjang; Range jangka sedang 0,471 s.d. 0,843.

Tabel 4.6
***Analytical Hierarchy Process* (AHP) Faktor Strategi**

	FAKTOR STRATEGI KUNCI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	BOBOT
A	**Mengeliminasi** gesekan antarumat beragama.	1,000	2,500	1,333	1,250	1,333	2,000	0,625	0,500	2,500	1,333	0,127
B	**Mengawasi** eks organisasi terlarang.	0,400	1,000	1,250	2,500	2,500	1,333	0,667	0,429	0,500	0,400	0,089
C	**Menginisiasi** anggaran pendidikan.	0,750	0,800	1,000	0,800	0,750	1,333	0,714	0,667	0,714	0,800	0,077
D	**Merancang** buku atau SOP penanganan konflik.	0,800	0,400	1,250	1,000	1,333	0,800	0,714	0,667	0,375	0,500	0,071
E	**Menjamin** kepercayaan masyarakat tetap tinggi.	0,750	0,400	1,333	0,750	1,000	0,800	0,429	0,500	0,625	1,250	0,071
F	**Mengelola** dukungan anggaran Kapolres.	0,500	0,750	0,750	1,250	1,250	1,000	0,714	0,667	0,714	0,750	0,075
G	**Menginisiasi** perizinan rumah ibadah	1,600	1,500	1,400	1,400	2,333	1,400	1,000	1,143	1,167	1,750	0,134
H	**Meningkatkan** jumlah personil yang pernah mengikuti pelatihan.	2,000	2,333	1,500	1,500	2,000	1,500	0,875	1,000	1,143	1,167	0,135
I	**Mengelola** dukungan universitas.	0,400	2,000	1,400	2,667	1,600	1,400	0,857	0,875	1,000	1,750	0,120
J	**Menggerakkan** anggota yang pernah mendapatkan pendidikan HAM.	0,750	2,500	1,250	2,000	0,800	1,333	0,571	0,857	0,571	1,000	0,100

B. Formulasi Strategi.

1. Visi

"Menjaga stabilitas kamtibmas dengan mencegah konflik antarumat beragama melalui optimalisasi pendidikan hak asasi manusia".

2. Misi

2.1 Memantapkan perencanaan pendidikan hak asasi manusia di Polres Purwakarta.

2.2 Memantapkan pengorganisaisan pendidikan hak asasi manusia di Polres Purwakarta.

2.3 Memantapkan pelaksanaan pendidikan hak asasi manusia di Polres Purwakarta.

2.4 Memantapkan pengendalian pendidikan hak asasi manusia di Polres Purwakarta.

3. Tujuan

3.1 Tercapainya perencanaan pendidikan hak asasi manusia di Polres Purwakarta.

3.2 Tercapainya pengorganisaisan pendidikan hak asasi manusia di Polres Purwakarta.

3.3 Tercapainya pelaksanaan pendidikan hak asasi manusia di Polres Purwakarta.

3.4 Tercapainya pengendalian pendidikan hak asasi manusia di Polres Purwakarta.

4. Kebijakan

Mengoptimalkan pendidikan hak asasi manusia guna mencegah konflik antarumat beragama.

5. Strategi

Berdasarkan gambar 4.1, dapat disimpulkan bahwa organisasi berada di kuadran 5a, yang mengindikasikan bahwa organisasi sedang fokus pada integrasi horizontal. Untuk mengatasi situasi seperti ini, organisasi perlu meningkatkan upaya koordinasi dengan stakeholder yang memiliki sumber daya yang relevan guna mendukung program kepolisian. Dalam hal ini, strategi umum yang digunakan adalah optimalisasi.

C. Implementasi Strategi

Pengimplementasian strategi merupakan langkah penting yang melibatkan unsur strategis, adaptif, visioner; dan dapat dioperasikan secara konkret. Beberapa hal yang termasuk dalam gagasan tentang pengimplementasian strategi adalah formula alternatif strategi, penetapan sasaran strategis, program, serta indikator kinerja program.

1. Jangka Pendek (0 – 3 Bulan)

1.1 Strategi: **Mengawasi** eks organisasi terlarang.

1.1.1 Sasaran: Anggota eks organisasi-organisasi terlarang.

1.1.2 Program.

a. Mendatakan jumlah organisasi-organisasi terlarang yang telah dibubarkan.

b. Mendatakan anggota organisasi-organisasi terlarang yang telah dibubarkan.

1.1.3 Indikator Kinerja Program.

a. Data organisasi-organisasi terlarang yang telah dibubarkan.

b. Data anggota organisasi-organisasi terlarang yang telah dibubarkan.

1.2 Strategi: **Menginisiasi** anggaran pendidikan.

1.2.1 Sasaran: Mendapatkan anggaran untuk pendidikan personil polres.

1.2.2 Program.

a. Hibah pemda.

b. Hibah CSR perusahaan.

1.2.3 Indikator Kinerja Program.

a. Mendapatkan anggaran dari Pemda.

b. Mendapatkan anggaran dari CSR perusahaan.

1.3 Strategi: **Merancang** buku atau SOP penanganan konflik.

1.3.1 Sasaran: SOP atau metode penanganan konflik

1.3.2 Program.

a. Pembuatan SOP atau metode penanganan pada saat terjadi konflik.

b. Pembuatan SOP atau metode penanganan pasca terjadi konflik.

1.3.3 Indikator Kinerja Program.

a. Adanya dokumen SOP atau metode penanganan pada saat terjadi konflik.

b. Adanya dokumen SOP atau metode penanganan pasca terjadi konflik.

1.4 Strategi: **Menjamin** kepercayaan masyarakat tetap tinggi.

1.4.1 Sasaran: Kepercayaan masyarakat terhadap Polres Purwakarta.

1.4.2 Program.

a. Transparansi kegiatan kepolisian.

b. Peningkatan pencegahan konflik.

1.4.3 Indikator Kinerja Program.

a. Press release kegiatan penegakan hukum, kegiatan pelayanan kepolisian dan kegiatan pencegahan kejahatan.

b. Tidak adanya konflik terbuka.

1.5 Strategi: **Mengelola** dukungan anggaran Kapolres.

1.5.1 Sasaran: Uang dukungan anggaran Kapolres.

1.5.2 Program.

a. Anggaran pendidikan.

b. Anggaran latihan peningkatan kemampuan.

1.5.3 Indikator Kinerja Program.

a. Tersedianya anggaran pendidikan.

b. Tersedianya anggaran latihan peningkatan kemampuan.

1.6 Strategi: **Menggerakkan** anggota yang pernah mendapatkan pendidikan HAM.

1.6.1 Sasaran: kompetensi anggota yang pernah mendapatkan pendidikan HAM.

1.6.2 Program.

a. Pelatihan kompetensi anggota yang pernah mendapatkan pendidikan HAM.

b. Kegiatan berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*).

1.6.3 Indikator Kinerja Program.

a. Jumlah dan hasil evaluasi pelatihan.

b. Jumlah kegiatan berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*).

2. Jangka Sedang (0 – 6 Bulan)

2.1 Strategi: **Mengeliminasi** gesekan antarumat beragama.

2.1.1 Sasaran: Masyarakat yang berdomisili maupun bekerja di Kab. Purwakarta.

2.1.2 Program.

a. Binluh anti radikalisme.

b. Kegiatan bersama antarumat beragama.

2.1.3 Indikator Kinerja Program.

a. Jumlah binluh anti radikalisme.

b. Jumlah kegiatan bersama antarumat beragama.

2.2 Strategi: **Mengelola** dukungan universitas.

2.2.1 Sasaran: Kerjasama terkait pendidikan dan pelatihan.

2.2.2 Program.

a. MoU dengan universitas terkait pendidikan dan pelatihan.

b. Pendidikan/pelatihan rutin dengan melibatkan universitas.

2.2.3 Indikator Kinerja Program.

a. Jumlah MoU dengan universitas terkait pendidikan dan pelatihan.

b. Jumlah pendidikan/pelatihan rutin dengan melibatkan universitas.

3. Jangka Panjang (0 – 12 Bulan)

3.1 Strategi: **Menginisiasi** perizinan rumah ibadah.

3.1.1 Sasaran: Terbitnya izin-izin pembanguan rumah ibadah.

3.1.2 Program.

a. Pendataan rumah-rumah ibadah tak berizin.

b. Pendampingan pengurusan izin-izin pembanguan rumah ibadah.

3.1.3 Indikator Kinerja Program.

a. Data dan jumlah rumah-rumah ibadah tak berizin.

b. Jumlah pendampingan pengurusan izin-izin pembanguan rumah ibadah.

3.2 Strategi: **Meningkatkan** jumlah personil yang pernah mengikuti pelatihan.

3.2.1 Sasaran: Anggota polres yang belum mengikuti pelatihan.

3.2.2 Program.

a. Mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan/*in-house training* secara rutin.

b. Melatih anggota polres yang belum mengikuti pelatihan.

3.2.3 Indikator Kinerja Program.

a. Pelatihan peningkatan kemampuan/*in-house training* sebulan sekali.

b. Melatih seluruh anggota polres yang belum mengikuti pelatihan.

D. Evaluasi dan Pengendalian.

1. Komunikasi dan Konsultasi;

Proses Manajemen Risiko di Polres Purwakarta dilakukan oleh Kapolres Purwakarta , dan tahapan-tahapannya terkait antara satu dengan yang lain seperti yang terlihat pada tabel di lampiran pada naskah ini. Komunikasi dan konsultasi memainkan peran penting di dalam penerapan Manajemen Risiko yang efektif. Komunikasi melibatkan pertukaran informasi yang terbuka dan jelas antara semua pihak yang terlibat, sedangkan konsultasi melibatkan pemangku kepentingan yang relevan. Polres Purwakarta menggunakan jadwal rapat berkala, insidental, FGD, dan penggunaan informasi manajemen risiko dalam matriks, yang dijelaskan secara lebih rinci pada tabel di lampiran naskah ini.

2. Penetapan Konteks;

Penetapan konteks dilakukan untuk memahami lingkungan dan bawahan penerapan manajemen risiko pada UPR tertentu. Hal ini termasuk mencakup sasaran dan proses organisasi, struktur manajemen risiko, daftar pemangku kepentingan, dan daftar peraturan perundang-undangan yang terkait. Informasi yang lebih rinci tentang penetapan konteks dapat ditemukan pada tabel yang tercantum dalam lampiran naskah.

3. Identifikasi Resiko;

Identifikasi risiko adalah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi semua kemungkinan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Sebelum melakukan identifikasi risiko, penting untuk menentukan kategori risiko terlebih dahulu. Setelah itu, hasil identifikasi risiko dicatat dalam formulir

profil dan peta risiko untuk memperlihatkan perinciannya. Gambaran lebih detail mengenai identifikasi risiko terdapat pada tabel yang dicantumkan di lampiran naskah ini.

4. Analisis Resiko;

   Tujuan dari analisis risiko adalah untuk menentukan besarnya dampak dan tingkat risiko. Analisis risiko dilakukan dengan cara menilai tingkat kemungkinan dan dampak terjadinya risiko berdasarkan kriteria risiko, setelah mempertimbangkan keefektifan sistem pengendalian yang ada. Detail melakukan analisis risiko dapat ditemukan dalam tabel yang terlampir pada naskah ini.

5. Evaluasi Resiko;

   Tahap ini memiliki tujuan untuk menentukan prioritas risiko, besarnya risiko tertinggal yang diharapkan, keputusan mitigasi risiko, dan indikator risiko utama. Evaluasi risiko secara lebih detail dilakukan melalui tabel yang terlampir pada naskah ini.

6. Mitigasi Resiko;

   Mitigasi risiko merujuk pada tindakan yang bertujuan untuk menurunkan atau menjaga besarnya risiko utama hingga mencapai level risiko yang diharapkan. Mitigasi risiko dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memilih opsi mitigasi risiko, mengembangkan rencana mitigasi risiko, dan melaksanakan rencana tersebut, dengan langkah-langkah seperti pemilihan opsi mitigasi risiko dan penyusunan rencana mitigasi risiko. Detail informasi terkait mitigasi risiko dapat ditemukan dalam tabel yang tersedia pada lampiran naskah ini.

7. Pemantauan dan Reviu.

   Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko berjalan efektif sesuai dengan rencana, dan memberikan umpan balik untuk penyempurnaan proses manajemen risiko. Pemantauan dan peninjauan risiko dilakukan pada semua tahapan dari Proses Manajemen Risiko, dengan langkah-langkah pemantauan, peninjauan, audit manajemen risiko, dan tata kelola manajemen risiko. Detail informasi tentang

pemantauan dan peninjauan risiko dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel di lampiran naskah ini.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Perencanaan pendidikan Hak Asasi Manusia atau pelatihan yang terkait dengan pencegahan atau penanganan konflik sosial dapat untuk internal anggota polres dapat dilakukan dengan mengajukan anggaran kepada Kapolres karena keseluruhan pendidikan dan pelatihan telah diambil alih oleh Polda sehingga tidak ada anggarannya di polres. Dalam perencanaan tersebut, Kabag SDM dapat mengirimkan nota dinas kepada Kapolres untuk memperoleh dana dukungan dari Kapolres. Selain itu, pendidikan Hak Asasi Manusia atau pelatihan yang terkait dengan pencegahan atau penanganan konflik sosial dapat diberikan kepada masyarakat melalui satuan Binmas. Meskipun demikian, anggaran Pemberdayaan Pembinaan Potkam yang ada tidak memiliki spesifikasi khusus terkait pendidikan Hak Asasi Manusia atau pelatihan yang berkaitan dengan pencegahan atau penanganan konflik sosial.
2. Dalam pengorganisasian pendidikan Hak Asasi Manusia atau pelatihan yang terkait dengan pencegahan atau penanganan konflik sosial, Kabag SDM dapat mengirimkan nota dinas kepada kasat untuk meminta daftar nama-nama personil yang akan mengikuti pelatihan HAM. Bagi personil SDM, Kabag SDM dapat menerbitkan surat perintah untuk menyelenggarakan pendidikan HAM atau pelatihan yang berhubungan dengan pencegahan atau penanganan konflik sosial. Pemateri pendidikan HAM atau pelatihan tersebut dapat berasal dari internal polres atau dari pihak eksternal, seperti dosen universitas setempat. Untuk pendidikan HAM atau pelatihan yang ditujukan kepada eksternal Polres, seperti komunitas atau kelompok masyarakat, personil Sat Binmas dapat melaksanakan tugas tersebut. Mereka dapat

memberikan pendidikan HAM kepada masyarakat saat kegiatan binluh atau sambang.

3. Pelaksanaan pendidikan Hak Asasi Manusia atau pelatihan yang terkait dengan pencegahan atau penanganan konflik sosial di lingkungan polres dilaksanakan berupa kegiatan latihan penginkatan kemampuan. Sedangkan bagi eksternal Polres, dapat dilakukan oleh personil Sat Binmas pada saat binluh atau sambang.
4. Pengawasan pendidikan Hak Asasi Manusia atau pelatihan yang terkait dengan pencegahan atau penanganan konflik sosial tidak harus dilakukan oleh Kapolres langsung, tetapi juga dapat didelegasikan kepada Wakapolres dan Sie propam.

B. Rekomendasi

1. Agar Kapolres Purwakarta dapat mendukung kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan/pendidikan Hak Asasi Manusia atau pelatihan yang terkait dengan pencegahan atau penanganan konflik sosial dengan memberikan dana dukgar Kapolres.
2. Mengadakan pelatihan/pendidikan Hak Asasi Manusia atau pelatihan yang terkait dengan pencegahan atau penanganan konflik sosial secara rutin minimal sebulan sekali.
3. Rekomendasi kepada Kapolda Jawa Barat c.q. Karo SDM agar memberikan pendidikan Hak Asasi Manusia atau pelatihan yang terkait dengan pencegahan atau penanganan konflik sosial kepada personil-personil polres jajaran secara rutin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hanjar

MP. Penanganan Konflik Sara, Sosial, Budaya dan Ideologi.

MP. Implementasi Hukum dan HAM Dalam Tugas Kepolisian.

B. Buku dan Artikel Jurnal

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Prentice-Hall.

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Harvard University Press.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. Springer US.

Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency. University of California Press.

Skinner, B. F. (1954). The science of learning and the art of teaching. Harvard Educational Review, 24(2), 86-97.

Piaget, J. (1973). To understand is to invent: The future of education. Grossman Publishers.

Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 82-91.

C. Peraturan Perundangan

Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999. (1999). Tentang Hak Asasi Manusia.

D. Berita Online

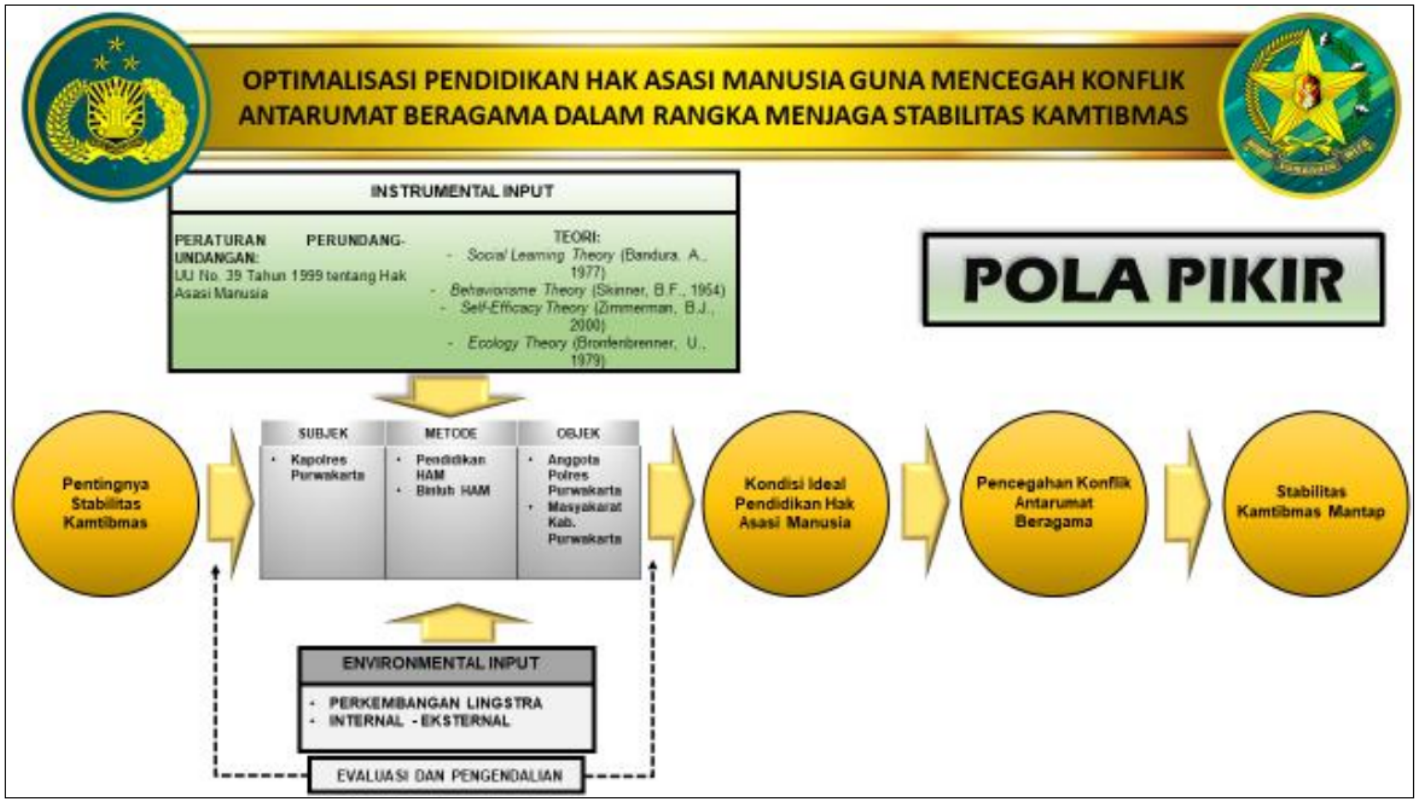
BBC Indonesia. (2010, 12 Desember). Ormas Islam menyegel tujuh rumah ibadah. BBC Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/12/101212_hkbp_bandung. Diakses pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 08.10 WIB.

Kumparan. (2021, 6 April). 4 Contoh Konflik Antar Agama yang Pernah Terjadi di Indonesia. Kumparan. https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/4-contoh-konflik-antar-agama-yang-pernah-terjadi-di-indonesia-20YvBlQA43W. Diakses pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 08.10 WIB

ALUR PIKIR


OPTIMALISASI PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA GUNA MENCEGAH KONFLIK ANTARUMAT BERAGAMA DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS KAMTIBMAS
LANDASAN PEMIKIRAN / TEORI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
TEORI:
- Social Learning Theory (Bandura. A., 1977)
- Behaviorisme Theory (Skinner, B.F., 1954)
- Self-Efficacy Theory (Zimmerman, B.J., 2000)
- Ecology Theory (Bronfenbrenner, U., 1979)
ALUR PIKIR
Pentingnya Stabilitas Kamtibmas
Kondisi faktual Pendidikan Hak Asasi Manusia
Proses pemecahan masalah
Kondisi Ideal Pendidikan Hak Asasi Manusia
Pencegahan Konflik Antarumat Beragama
Stabilitas Kamtibmas Mantap
• Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis
• Faktor eksternal & internal

POLA PIKIR


OPTIMALISASI PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA GUNA MENCEGAH KONFLIK ANTARUMAT BERAGAMA DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS KAMTIBMAS
POLA PIKIR
INSTRUMENTAL INPUT
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
TEORI:
- Social Learning Theory (Bandura, A., 1977)
- Behaviorisme Theory (Skinner, B.F., 1954)
- Self-Efficacy Theory (Zimmerman, B.J., 2000)
- Ecology Theory (Bronfenbrenner, U., 1979)
Pentingnya Stabilitas Kamtibmas
SUBJEK
Kapolres Purwakarta
METODE
Pendidikan HAM
Bimbi HAM
OBJEK
Anggota Polres Purwakarta
Masyarakat Kab. Purwakarta
Kondisi Ideal Pendidikan Hak Asasi Manusia
Pencegahan Konflik Antarumat Beragama
Stabilitas Kamtibmas Mantap
ENVIRONMENTAL INPUT
PERKEMBANGAN LINGSTRA
INTERNAL - EKSTERNAL
EVALUASI DAN PENGENDALIAN

LAMPIRAN ES – OHA

EKSTERNAL (PESTEL)	INTERNAL (SDO – 4M)
1. POLITIK a. Kerjasama dengan lembaga keagamaan **2. EKONOMI** a. Adanya bantuan Pemda **3. SOSIAL** a. Adanya dukungan universitas b. Kepercayaan masyarakat tinggi c. Eks organisasi terlarang d. Gesekan antarumat beragama e. Banyaknya hoax **4. TEKNOLOGI** a. Perkembangan IT **5. ENVIRONMENTAL** a. - **6. LEGAL** a. Rumah ibadah tak berizin b. Sulit menendapatkan izin pendirian rumah ibadah	**1. SDM** a. Inisiatif Kabag SDM b. Pernah mendapatkan pendidikan HAM c. Personil yang pernah mengikuti pelatihan sangat sedikit **2. ANGGARAN** a. Dukungan anggaran Kapolres b. Tidak ada anggaran pendidikan **3. SARPRAS** a. Sedikitnya kendaraan taktis **4. SISTEM DAN METODE** a. Adanya pelatihan penanganan radikalisme b. Pemetaan konflik yang baik c. Jarangnya pendidikan HAM dari satuan atas d. Tidak ada buku atau SOP penanganan konflik

LAMPIRAN ANALISIS SWOT

INTERNAL		EKSTERNAL	
KEKUATAN	**KELEMAHAN**	**PELUANG**	**ANCAMAN**
Inisiatif Kabag SDM.	Tidak ada anggaran pendidikan.	Adanya bantuan Pemda.	Eks organisasi terlarang.
Dukungan anggaran Kapolres.	Jarangnya pendidikan HAM dari satuan atas.	Adanya dukungan universitas.	Gesekan antarumat beragama.
Pernah mendapatkan pendidikan HAM.	Personil yang pernah mengikuti pelatihan sangat sedikit.	Kepercayaan masyarakat tinggi.	Banyaknya hoax.
Adanya pelatihan penanganan radikalisme.	Tidak ada buku atau SOP penanganan konflik.	Kerjasama dengan lembaga keagamaan.	Rumah ibadah tak berizin.
Pemetaan konflik yang baik.	Sedikitnya kendaraan taktis.	Perkembangan IT.	Sulit menendapatkan izin pendirian rumah ibadah.

LAMPIRAN AHP

EFAS

OPPORTUNITIES (PELUANG)		A	B	C	D	E
A	Adanya bantuan Pemda.		7/6	6/7	8/6	7/6
B	Adanya dukungan universitas.	6/7		6/7	7/6	7/6
C	Kepercayaan masyarakat tinggi.	7/6	7/6		8/6	7/6
D	Kerjasama dengan lembaga keagamaan.	6/8	6/7	6/8		6/7
E	Perkembangan IT.	6/7	6/7	6/7	7/6	

THREATS (ANCAMAN)		A	B	C	D	E
A	Eks organisasi terlarang.		2/3	3/2	3/1	4/2
B	Gesekan antarumat beragama.	3/2		4/2	4/3	3/1
C	Banyaknya hoax.	2/3	2/4		2/3	4/3
D	Rumah ibadah tak berizin.	1/3	3/4	3/2		4/1
E	Sulit menendapatkan izin pendirian rumah ibadah.	2/4	1/3	3/4	1/4	

IFAS

STRENGTH (KEKUATAN)		A	B	C	D	E
A	Inisiatif Kabag SDM.		7/6	6/7	6/7	6/7
B	Dukungan anggaran Kapolres.	6/7		8/6	8/7	8/6
C	Pernah mendapatkan pendidikan HAM.	7/6	6/8		7/8	8/7
D	Adanya pelatihan penanganan radikalisme.	7/6	7/8	8/7		7/6
E	Pemetaan konflik yang baik.	7/6	6/8	7/8	6/7	

WEAKNESS (KELEMAHAN)		A	B	C	D	E
A	Tidak ada anggaran pendidikan.		3/2	3/2	4/3	3/2
B	Jarangnya pendidikan HAM dari satuan atas.	2/3		2/3	2/4	1/2
C	Personil yang pernah mengikuti pelatihan sangat sedikit.	2/3	3/2		4/5	2/1
D	Tidak ada buku atau SOP penanganan konflik.	3/4	4/2	5/4		4/2
E	Sedikitnya kendaraan taktis.	2/3	2/1	1/2	2/4	

SFAS

No.	FAKTOR STRATEGIS KUNCI	WEIGHT	RATING	SCORE	JANGKA		
					PDK	MEN	PJG
1	**Mengeliminasi** gesekan antarumat beragama.	0,127	5	0,635			
2	**Mengawasi** eks organisasi terlarang.	0,089	4	0,358			
3	**Menginisiasi** anggaran pendidikan.	0,077	5	0,385			
4	**Merancang** buku atau SOP penanganan konflik.	0,071	4	0,285			
5	**Menjamin** kepercayaan masyarakat tetap tinggi.	0,071	2	0,142			
6	**Mengelola** dukungan anggaran Kapolres.	0,075	2	0,150			
7	**Menginisiasi** perizinan rumah ibadah	0,134	7	0,938			
8	**Mengerahkan** personil yang pernah mengikuti pelatihan sangat sedikit.	0,135	9	1,214			
9	**Mengelola** dukungan universitas.	0,120	4	0,480			
10	**Menggerakkan** anggota yang pernah mendapatkan pendidikan HAM.	0,100	1	0,100			

LAMPIRAN MANAJEMEN RISIKO

1. TABEL KOMUNIKASI DAN KONSULTASI

NO	KEGIATAN	TIMELINE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rapat Berkala	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Rapat Insidental	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	FGD	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Membangun Sistem Informasi Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Membangun budaya risiko	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Reviu MR	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. *Update* Data	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Pelaporan	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. PENETAPAN KONTEKS

KONTEKS MANAJEMEN RISIKO (**OPTIMALISASI PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA GUNA MENCEGAH KONFLIK ANTARUMAT BERAGAMA DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS KAMTIBMAS**)
Nama Pemilik risiko : AKBP.
Jabatan Pemilik Risiko : Kapolres Purwakarta
Unit Organisasi : Polres Purwakarta
Ruang Lingkup Penerapan : PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA
Periode Penerapan : Januari – Maret 2024

2.1 Sasaran dan Proses Organisasi.

NO	DAFTAR SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROSES BISNIS
1.	Anggota eks organisasi-organisasi terlarang	- Data organisasi-organisasi terlarang yang telah dibubarkan - Data anggota organisasi-organisasi terlarang yang telah dibubarkan	- Mendatakan jumlah organisasi-organisasi terlarang yang telah dibubarkan - Mendatakan anggota organisasi-organisasi terlarang yang telah dibubarkan
2.	Mendapatkan anggaran untuk pendidikan personil polres	- Mendapatkan anggaran dari Pemda. - Mendapatkan anggaran dari CSR perusahaan	- Hibah pemda - Hibah CSR perusahaan

2.2 Struktur Manajemen Risiko.

NO	PERAN DALAM MANAJEMEN RISIKO	JABATAN	NAMA
1.	Pemilik Risiko	Kapolres	AKBP.
2.	Pengelola Risiko	Kabag. SDM	Kompol.

2.3 Daftar Pemangku Kepentingan.

NO	*STAKEHOLDER*/PEMANGKU KEPENTINGAN	HUBUNGAN
1.	Kapolres	Penanggungjawab
2.	Kabag SDM	Pelaksana

2.4 Daftar Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait.

NO	PERATURAN TERKAIT	AMANAT PERATURAN YANG TERKAIT UNIT
1.	UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Negara menjamin Hak Asasi Manusia seluruh warganya
2.		
3.		
4.		

2.5 Kriteria Risiko.

2.5.1 Kriteria Kemungkinan

Tingkat Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
	Persentase kemungkinan terjadinya dalam 1 periode	Jumlah Frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 periode
Hampir tidak terjadi (1)	$x < 5\%$	Sangat jarang : Kurang dari 2 kali dalam 1 tahun
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	Jarang : 2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	Cukup sering : 6 kali s.d. 9 kali dalam 1 tahun
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	Sering : 10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun
Hampir pasti terjadi (5)	$x > 50\%$	Sangat sering : lebih dari 12 kali dalam 1 tahun

2.5.2 Kriteria Dampak

Area Dampak		Tingkat	Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Beban Keuangan Negara	*Fraud*	Kementerian				Rp. 100 Juta ≤ x < Rp. 1 Miliar	x ≥ Rp. 1 Miliar
		Eselon I				Rp. 10 Juta ≤ x < Rp. 100 Juta	x ≥ Rp. 100 Juta
		Eselon III				x <Rp. 10 Juta	x ≥ Rp. 10 Juta
	Non Fraud	Kementerian, Eselon I, Eselon II	0,01 per mil ≥ x	0,01 per mil < x ≤ 0,1 per mil	0,01 per mil < x ≤ 1 per mil	1 per mil < x ≤ 10 per mil	x > 10 per mil
Penurunan Reputasi		Kementerian dan Eselon I	Tingkat kepercayaan stakeholders sangat baik • Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 3,5 < x ≤ 4 (skala 4)	Tingkat kepercayaan stakeholders baik • Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 3,25 < x ≤ 3,5 (skala 4)	Pemberitaan negatif di media social Pemberitaan negatif di media massa local Tingkat kepercayaan stakeholders sedang Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 3 < x≤ 3,25 (skala 4)	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan internasional Tingkat kepercayaan stakeholders rendah Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 2,5 < x ≤ 3 (skala 4)	Tingkat kepercayaan stakeholders sangat rendah Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar • ≤ 2,5 (skala 4)

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko.

2.5.3 Matriks Analisis Risiko.

Matriks Analisis Risiko			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	**11**	**16**	**20**	**23**	**25**
	4	Sering Terjadi	**7**	**12**	**17**	**21**	**24**
	3	Kadang Terjadi	**4**	**8**	**13**	**18**	**22**
	2	Jarang Terjadi	**2**	**5**	**9**	**14**	**19**
	1	Hampir Tidak Terjadi	**1**	**3**	**6**	**10**	**15**

2.5.4 Level Risiko.

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	21-25	Merah
Tinggi (4)	16-20	Oranye
Sedang (3)	11-15	Biru
Rendah (2)	6-10	Kuning
Sangat Rendah (1)	1-5	Hijau

3. IDENTIFIKASI RISIKO

Kategori Risiko	Definisi
Risiko Kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal organisasi yang berdampak terhadap organisasi.
Risiko Keuangan Negara dan Kekayaan Negara	Berkaitan kondisi fiskal pemerintah meliputi kerangka ekonomi makro, penganggaran, perpajakan, kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan serta berkaitan dengan kekayaan negara yang meliputi Barang Milik Negara (BMN), kekayaan negara yang dipisahkan, investasi pemerintah dan kekayaan negara lainnya.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan organisasi atau pihak eksternal terhadap peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku
Risiko Legal	Risiko yang berkaitan dengan tuntutan/gugatan hukum kepada organisasi atau jabatan
Risiko *Fraud*	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang barang/harta, jasa yang dilakukan oleh satu atau lebih di lingkungan organisasi
Risiko Reputasi	Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi
Risiko Operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu

3.1 Profil Risiko.

Formulir Peta Risiko

Unit Organisasi : Polres Purwakarta
Periode Penerapan : Januari – Maret 2024

Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian Yang Dilaksanakan	Efektivitas Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko	LR	Prioritas Risiko	Risiko Residual			Keputusan Mitigasi	Indikator Risiko Utama (IRU)	
	No.	Kejadian	Penyebab	Dampak				LK	Penjelasan	LD	Penjelasan				LK	LD	LR		Nama	Batasan Nilai
Peningkatan integritas dan disiplin personel	1	Tidak ada Diklat Pembinaan Etika Kepribadian	Kurangnya koordinasi	Tidak tercapainya Pembaharuan perilaku personel di Polres Purwakarta	Risiko Kebijakan	UU 2/2002, Perkap 99/2020 Perkap 2/2021, Perkap 7/2022	Efektif	3	Kadang Terjadi	4	Signifikan	18	Tinggi	R1	2	3	9	Ya	Frekuensi koordinasi	Batas aman = Sebulan Sekali Batas atas = Sebulan 6 kali Batas Bawah = 3 bulan 1 kali

Identifikasi Risiko

Evaluasi Risiko

Analisis Risiko + Peta Risiko

3.2 Peta Risiko.

Matriks Analisis Risiko			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	**11**	**16**	**20**	**23**	**25**
	4	Sering Terjadi	**7**	**12**	**17**	**21**	**24**
	3	Kadang Terjadi	**4**	**8**	**13**	**18**	**22**
	2	Jarang Terjadi	**2**	**5**	**9**	**14**	**19**
	1	Hampir Tidak Terjadi	**1**	**3**	**6**	**10**	**15**

4. ANALISIS RISIKO.

Menginventarisasi sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

R1	*Does the control deal with (root) cause of risk and impact?*	*is the control officially documented and communicated?*	*Is the control in operation and applied consistenly?*	
YES	**1**	**1**	**1**	
PARTLY	**3**	**2**	**2**	
NO	**6**	**3**	**3**	
R1	1	1	2	4
Nilai **4**: menunjukkan *existing control* berjalan **EFEKTIF**.				

Cara Penghitungan dari Gambar di atas:

a. Jika pengendalian memiliki hubungan dengan penyebab dampak risiko beri nilai 1 (*yes*), jika sebagian beri nilai 3, jika tidak berhubungan sama sekali beri nilai 6;

b. Jika pengendalian telah dibuatkan Peraturan dan dikomunikasikan beri nilai 1. Jika sebagian pengendalian yang ada peraturan dan dikomunikasikan atau sudah semua dibuat aturan, namun belum dikomunikasikan beri nilai 2. Jika sama sekali belum, beri nilai 3;

c. Jika seluruh pengendalian diterapkan secara konsisten, beri nilai 1. Jika sebagian beri nilai 2. Jika tidak beri nilai 3;

d. Jumlahkan nilai tersebut dan tentukan efektivitasnya dengan ketentuan:

   1) Jika berjumlah 8-12 : Tidak Efektif (TE)

   2) Jika berjumlah 6-7 : Kurang Efektif (KE)

   3) Jika berjumlah <5 : Efektif

5. MITIGASI RISIKO.

FORMULIR MITIGASI RISIKO

Unit Organisasi : Polres Purwakarta
Periode Penerapan : Januari – Maret 2024

No.	Rencana Mitigasi							
	Kejadian Risiko	**Opsi Mitigasi Risiko**	**Rencana Aksi Mitigasi Risiko**	**Keluaran**	**Target**	**Kendala**	**Sumber Daya Yg Dibutuhkan**	**Jadwal Implementasi**
R1	Tidak terdatakan seluruh anggota eks organisasi-organisasi terlarang	Menurun-kan kemung-kinan dan dampak terjadinya risiko	Melakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal	Terlaksana 100 %	Dilaks 6 giat selama 3 bulan	Tidak ada	SDM, Anggaran, Sarpras, Regulasi	Januari – Maret 2024
R2	Tidak mendapatkan anggaran untuk pendidikan personil polres	Menurun-kan kemung-kinan dan dampak terjadinya risiko	Memerintahka n siewas dan sie propam untuk mengingatkan anggota untuk hadir	Terlaksana 100 %	Dilaks 6 giat selama 3 bulan	Tidak ada	SDM, Anggaran, Sarpras, Regulasi	Januari – Maret 2024

6. PEMANTAUAN DAN REVIEW

6.1 Formulir Laporan Pemantauan Semesteran I

Unit Organisasi: Polres Purwakarta
Periode Penerapan: Januari – Maret 2024

Prioritas Risiko	Mitigasi Risiko						Indikator Risiko Utama				
	Aksi / Pengendalian	Keluaran	Target	Realisasi	Waktu Implementasi	Penanggung jawab	Nama	Batasan Nilai	Nilai Aktual	Status	Tren Risiko
R1	Melakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal	Terlaksana 100%	Dilaksanakan 6 giat selama 3 bulan	Terdatanya jumlah dan anggota organisasi-organisasi terlarang yang telah dibubarkan	6 kali selama 3 bulan	Kabag SDM	Frekuensi koordinasi	Batas aman = Sebulan Sekali Batas atas = Sebulan 6 kali Batas Bawah = 3 bulan 1 kali	3	Hijau	menurun
R2	Melakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal	Terlaksana 100%	Dilaksanakan 6 giat selama 3 bulan	Mendapatkan anggaran untuk pendidikan personil polres	6 kali selama 3 bulan	Kabag SDM	Frekuensi koordinasi	Batas aman = Sebulan Sekali Batas atas = Sebulan 6 kali Batas Bawah = 3 bulan 1 kali	3	Hijau	menurun

6.2 Formulir Laporan Pemantauan Tahunan.

Unit Organisasi: Polres Purwakarta
Periode Penerapan: Januari – Maret 2024

6.2.1 Peta Penilaian Efektivitas Penanganan.

Prioritas Risiko	Tingkat Risiko Sebelu			Risiko Residual Harapan			Tingkat Risiko Aktual			Tren Risiko	Deviasi / Kesenjangan	Rekomendasi
	LK	LD	LR	LK	LD	LR	LK	LD	LR			
R1	3	4	18	2	3	9	1	2	3	Menurun	Penurunan 9-3 = 6	-

Keterangan: LK: Level Kemungkinan; LD: Level Dampak; LR: Level Risiko

6.2.2 Peta Hasil Penanganan Risiko.

Matriks Analisis Risiko			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	**11**	**16**	**20**	**23**	**25**
	4	Sering Terjadi	**7**	**12**	**17**	**21**	**24**
	3	Kadang Terjadi	**4**	**8**	**13**	**18 ✦R1**	**22**
	2	Jarang Terjadi	**2**	**5**	**9 ✦R1**	**14**	**19**
	1	Hampir Tidak Terjadi	**1**	**3 ✦R1**	**6**	**10**	**15**

NKP4

ORIGINALITY REPORT

5%	4%	1%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Police Academy – University of Police Science Student Paper	2%
2	peraturan.go.id Internet Source	1%
3	repo.unand.ac.id Internet Source	1%
4	info.trilogi.ac.id Internet Source	1%
5	baixardoc.com Internet Source	1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		